

**PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI FRESHGRADUATE DI MASA
PANDEMI COVID-19, APA PERAN PEMERINTAH?**

***EXPANSION OF JOB OPPORTUNITIES FOR FRESHGRADUATE DURING THE
COVID-19 PANDEMIC, WHAT IS THE GOVERNMENT TO DO?***

Maria Lusyana Br Ginting

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-6, Jakarta Selatan
marialsyna@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi menyebabkan kemunduran di bidang ketenagakerjaan, yaitu pengangguran yang semakin tinggi. Data Kamar Dagang dan Industri Indonesia per Juni 2020 menunjukkan bahwa pekerja terkena PHK sebanyak 6 juta pekerja. Lulusan baru sebagai anak muda mengalami dampak yang cukup terasa dari pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data BPS Agustus 2020, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, mencapai 20,46 persen. Dari persoalan tersebut, maka tulisan ini dibuat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur, baik dari buku, jurnal, koran, hasil penelitian yang sudah ada, maupun media daring yang kredibel. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perluasan kesempatan kerja bagi freshgraduate di masa pandemi covid-19. Hasil yang didapat dari kajian ini adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja belum optimal terfokus pada freshgraduate dilihat dari beberapa program yang telah dikeluarkan selama masa pandemi. Rekomendasi yang diberikan adalah menyediakan dan memperluas ruang dan akses bagi freshgraduate untuk dapat mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* melalui pelatihan yang terverifikasi yang telah diakui oleh perusahaan-perusahaan, Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja perlu mengoptimalkan Program Tenaga Kerja Mandiri dengan menambahkan fokus pada perluasan kesempatan kerja bagi *freshgraduate* dengan memperhatikan kebutuhan, minat bakat, dan *skill* oleh *freshgraduate* dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai universitas, dan memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan perusahaan seperti BUMN, BUMD, dan swasta.

Kata Kunci: kesempatan kerja; peran pemerintah; pengangguran

ABSTRACT

The pandemic caused a setback in the field of employment, namely higher unemployment. Data from the Indonesian Chamber of Commerce and Industry as of June 2020 shows that 6 million workers have been laid off. New graduates as young people are experiencing quite the impact of this Covid-19 pandemic. Based on BPS data in August 2020, the TPT for the young age group (15–24 years) is the highest, reaching 20.46 per cent. From these problems, this paper was made. The method used in this paper is a literature review, both from books, journals, newspapers, existing research results, and credible online media. The purpose of this study is to find out how the government's role is in providing expansion of job opportunities for fresh graduates during the COVID-19 pandemic. The results obtained from this study are that the government's role in expanding job opportunities has not been optimally focused on fresh graduates, as seen from several programs that have been issued during the pandemic. The recommendation given is to provide and expand space and access for fresh graduates to be able to develop hard skills and soft skills through verified training that companies have recognized, by adding a focus on expanding job opportunities for fresh graduates by taking into account the needs, interests, talents, and skills of fresh graduates by cooperating collaborating with various universities. Strengthening collaboration and cooperation between the central government, local governments and companies such as BUMN, BUMD, and private.

Keywords: job opportunities; the role of the government; unemployment

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang terus dihadapi suatu bangsa dan negara. Setiap tahun terdapat lulusan-lulusan baru mulai dari tingkat sekolah sampai universitas, dan hal tersebut diikuti dengan angka pengangguran yang meningkat.

Pengangguran tersebut diakibatkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, dengan kata lain jumlah pencari kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan pun disaat angka tenaga kerja semakin tinggi mengakibatkan banyak pengangguran terjadi.

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh 2 faktor yaitu permintaan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah penyebab terjadinya pengangguran. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada.

Tingginya tingkat pengangguran tentu mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat, karena salah satu aspek dari pembangunan nasional adalah adanya peningkatan di sektor ekonomi di suatu negara. Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah menjadi permasalahan utama khususnya di negara dengan jumlah penduduk yang tinggi (Annazah & Rahmatika, 2019). Salah indikator penting dalam keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut Shumpeter, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan produk domestik bruto (PDB/GDP), karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. Maka dapat dilihat, ketika pendapatan masyarakat menurun, maka pendapatan nasional juga akan menurun (Indayani & Hartono, 2020).

Angka pengangguran 3 tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran

terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat sebanyak 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019. Diikuti dengan data penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta orang dari 126,45 orang, penurunan tersebut terjadi dari Agustus 2019 (BPS, 2020).

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 meningkat sebesar 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,24 persen dibandingkan Agustus 2019 (BPS, 2020). Perubahan TPAK salah satunya disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan penduduk yang menyebabkan pergeseran kegiatan di sektor domestik ke publik. Berikut gambaran angkatan kerja di Indonesia per 2018-2020.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	juta orang	juta orang	juta orang
Penduduk Usia Kerja	198,13	201,19	203,97
Angkatan Kerja	133,36	135,86	138,22
Bekerja	126,29	128,76	128,45
Pengangguran	7,07	7,10	9,77
Bukan Angkatan Kerja	64,77	65,33	65,75
	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,30	5,23	7,07
Perkotaan	6,44	6,29	8,98
Perdesaan	3,97	3,92	4,71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,31	67,53	67,77
Laki-Laki	82,80	83,25	82,41
Perempuan	51,80	51,81	53,13

Gambar 1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2018–2020

Sumber: BPS 2020

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan struktur perekonomian Indonesia tidak proposional (Rahadian, 2019). Penyebab belum terserapnya tenaga kerja secara maksimal adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang kurang, dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit. Salah satu ciri struktur kesempatan kerja di Indonesia adalah adanya kesempatan kerja *skilled* yang tidak dapat diisi oleh Angkatan Kerja yang tersedia dan juga banyaknya Angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Perubahan dalam struktur

perekonomian menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis tingkat keterampilan yang berbeda. keadaan ini menyebabkan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada.

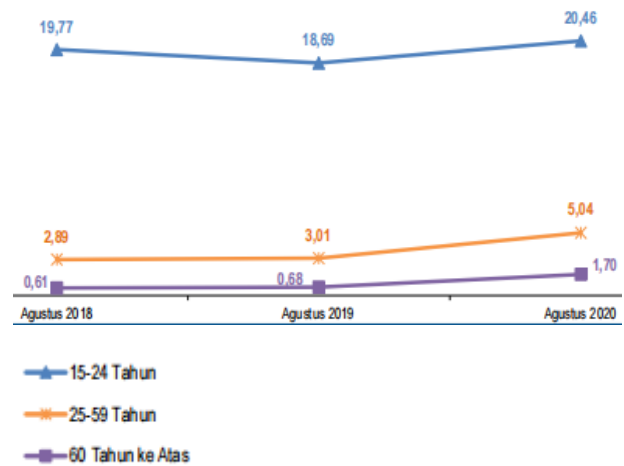
Pengangguran tersebut pun semakin meningkat dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 lalu. Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menghentikan pergerakan ekonomi, pendidikan, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini memuat bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menghambat penyebaran Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia (Ginting & Herdiyana, 2020). Salah satu akibat dari PSBB tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia per Juni 2020 jumlah pekerja dirumahkan dan terkena PHK dampak Covid-19 sebanyak 6 juta pekerja (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2020), tentu hal tersebut menunjukkan besarnya angka pengangguran di masa pandemi.

Dampak dalam bidang pendidikan yang mengarah pada ketenagakerjaan dialami pada alumni baru. Dalam kondisi yang penuh keterbatasan seperti sekarang ini, tidak mudah bagi para alumni memasuki dunia kerja. Para alumni perlu mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang peluang-peluang kerja terutama pada masa new normal seperti sekarang (LPMPP UNY, 2020).

Lulusan baru Universitas sebagai anak muda mengalami dampak yang cukup terasa dari pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data BPS Agustus 2020, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 20,46 persen. Penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 38,89 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,33 persen, dan kontribusi pendidikan Universitas pada

penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 0,06 persen (BPS, 2020). Berikut data tren tingkat TPT berdasarkan tingkat usia.



Gambar 2 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur (persen) Agustus 2018–Agustus 2020

Sumber: BPS 2020

Dilihat dari data tersebut menunjukkan usia muda kesulitan mendapatkan pekerjaan, terlebih pada masa pandemi. Akibat dari pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan adalah keterbatasan lowongan kerja, yang juga berdampak bagi freshgraduate. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi bagi freshgraduate juga dikarenakan keterbatasan pengalaman kerja mereka. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, banyak perusahaan kecil hingga besar mengurangi karyawannya, bahkan gulung tikar. Maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah pada sektor ketenagakerjaan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun menjadi kendala bagi perusahaan atau pencari kerja untuk dapat membuka lowongan pekerjaan maupun mencari lowongan kerja. Terhentinya banyak aktivitas perusahaan sehingga banyak perusahaan tidak dapat membuka lowongan pekerjaan bahkan melakukan PHK.

Temuan baru pada jurnal yang berjudul *The Issue of Graduate Unemployment in Malaysia: Post Covid-19* mengatakan dalam wawancara mereka bahwa beberapa lulusan tidak proaktif dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, meski pun terdapat pelatihan *online* gratis dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengetahuan di

masa pandemi covid-19. Rendahnya kemauan lulusan-lulusan tersebut untuk mengikuti pelatihan *online* gratis tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan (Abd Rahman, Ismail, Ridzuan, & Abd Samad, 2020). Hal serupa terjadi di Indonesia, mengutip yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Progam Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menilai, jumlah pengangguran di Indonesia masih relatif besar, karena banyak diantaranya yang enggan mengasah diri dengan ikut pelatihan kerja. Perusahaan maupun pekerja di Indonesia cenderung tak peduli dengan skilling, upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja (Kencana, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut tulisan dibuat. Peran pemerintah dibutuhkan oleh para freshgraduate universitas untuk dapat memberikan mereka pekerjaan, dimana tanggung jawab negaralah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Peluang kerja harus dapat disediakan oleh negara guna menanggulangi masalah ketenagakerjaan khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apa tantangan freshgraduate di masa pandemi Covid-19 dalam mendapatkan pekerjaan? Apa saja peluang kerja yang tersedia di masa pandemi Covid-19? Apa peran pemerintah dalam memberikan perluasan kerja bagi freshgraduate di masa pandemi Covid-19? Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi freshgraduate di masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini adalah merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya (Dits Prasanti, 2020). Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini (Rasdi &

Kurniawan, 2019). Data diambil dari rujukan ataupun bahan acuan dari berbagai sumber tulisan ilmiah, seperti jurnal penelitian, buku, bulletin, pemberitaan yang ada pada media publish, dan website yang kredibel yang sesuai dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan data dan informasi pada kajian ini adalah studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan kajian ini (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan sejak November 2020 hingga Maret 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Freshgraduate di Masa Pandemi Covid-19 dalam Mendapatkan Pekerjaan

Masa pandemi Covid-19 ini membuat tantangan yang dihadapi para lulusan baru semakin kompleks. Sebelum masa pandemi sulitnya mendapat pekerjaan, setelah pandemi semakin sulit mendapat pekerjaan karenanya keadaan ekonomi yang semakin tidak baik dan semakin banyaknya pengangguran.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa tingkat pengangguran muda Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Indonesia berada pada tingkat teratas untuk pengangguran muda dengan menyentuh angka 20 persen pada tahun 2020 se-Asian Tenggara, dimana negara lainnya berada pada angka dibawah 15%. Sebelum pandemi memang pengangguran yang umurnya antara 20-29 atau di 20an tahun mengalami peningkatan. Sementara, yang usianya lebih tua dari itu relatif lebih *flat*. Dilihat dari hal tersebut Indonesia dihadapkan pada masalah *educated youth employment* (CNN Indonesia, 2021).

Data TPT BPS pada latar belakang diatas juga menunjukkan freshgraduate lulusan pendidikan menengah ke atas mendominasi angkut pengangguran muda.

Beberapa tantangan baru yang dihadapi para lulusan baru adalah sebagai berikut.

1. Persaingan yang semakin ketat.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (BPS, 2020) . Hal tersebut tentu membuat persaingan dalam pemencari pekerjaan semakin ketat karena jumlah pengangguran semakin tinggi. Persaingan ini dirasakan semakin ketat dikarenakan para pesaing lulusan baru bukan hanya pada angkatan yang sama namun juga angkatan sebelumnya, yaitu para pekerja yang di PHK akibat dari pandemi Covid-19. Banyak perusahaan terutama di awal pandemi menghentikan memberhentikan karyawannya dan memberhentikan atau tidak melakukan perekrutan sehingga terserapnya angkatan kerja semakin menurun. Salah satu kesulitan freshgraduate dalam mendapatkan pekerjaan di masa pandemi adalah mereka harus bersaing pula dengan pekerja yang sudah berpengalaman (dalam hal ini adalah karyawan yang juga terkena PHK).

2. Perubahan Kondisi Pasar Kerja

Tantangan lain yang dialami freshgraduate adalah adanya perubahan kondisi pasar kerja. Perubahan tersebut melingkupi:

- Dominasi sektor informal
- Digital ekonomi yang semakin masif (Isbah, Kustiningsih, & Kailani, 2020)

Pada iklan lowongan pekerjaan, banyak perusahaan yang memiliki persyaratan rekrutmen di bidang soft skill, seperti kemampuan berbicara, kepemimpinan, dapat berinteraksi dengan banyak orang, dan sebagainya, dan hal tersebut merupakan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh freshgraduate. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2020) bahwa terdapat banyak faktor yang membuat mahasiswa fresh graduate mengalami kecemasan dalam mencari pekerjaan yaitu kurangnya soft skill seperti leadership, public speaking, kurangnya pengalaman organisasi, kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan kurangnya informasi mengenai pekerjaan itu sendiri

3. Adaptasi dengan *new normal*

Dalam hal ini setiap seluruh aspek pekerjaan harus menghadapi sistem tatanan kerja yang baru. Freshgraduate pun harus mengikuti pola perubahan dari sistem kerja perusahaan, mulai dari perekrutan calon tenaga kerja. Dalam hal ini freshgraduate dituntut untuk belajar kemampuan baru karena di era new normal penggunaan teknologi sangat diutamakan. Jika freshgraduate tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, tentu juga karena pengalaman yang kurang akan teknologi dalam dunia kerja, maka hal tersebut dapat menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan.

Kemampuan beradaptasi dan resiliensi karir berperan penting ketika seseorang menghadapi masa pandemi. Kemampuan tersebut dapat membantu seseorang mengelola jalur karir dan meningkatkan kepribadian profesional dengan baik walaupun dalam keadaan terburuk sekalipun (Ramdhani & Kiswanto, 2020).

Hasil penelitian pada jurnal yang berjudul *Covid-19's Impact on Fresh Graduate's Job Market in Bangladesh: An Observational Study* mengatakan lulusan baru lebih menyukai bekerja di pemerintahan dibanding bekerja mandiri, budaya kerja *work from home* menciptakan fleksibilitas namun tidak untuk semua jenis pekerjaan, menerapkan digitalisasi dapat menjadi solusi bagi institusi pendidikan, dan Universitas kurang dalam menerapkan keterampilan berbasis pekerjaan dan hal tersebut harus segera diubah (Khan, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih dan Fatima Abdulllah di kota Malang menunjukkan terdapat perbedaan pencari kerja dan lowongan kerja sebelum dan pada saat pandemi, dimana PSBB menghambat pencari kerja untuk mencari pekerjaan.

B. Peluang Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Kesempatan kerja menurut BPS adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja, maka

kesempatan kerja atau peluang kerja tentu sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang berkualitas, sehingga memperluas lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2020 jumlah freshgraduate yang lulus sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Lulusan Tahun 2020

No.	Jenjang	Jumlah Lulus
1.	D1	5.335
2.	D2	4.259
3.	D3	228.228
4.	D4	50.205
5.	S1	1.043.015
6.	S2	95.001
7.	S3	7.399

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat banyaknya lulusan baru terutama pada jenjang universitas. Pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan tersebut. Kenyataan yang ada adalah peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya lulusan tersebut, khususnya lulusan S1, dimana pada umumnya lulusan studi S2 dan S3 adalah mereka yang sudah bekerja.

Menurut BPS data per Agustus 2020, memperlihatkan kesempatan kerja pada beberapa provinsi: DKI 89,05%, Banten 89,36%, Jawa Barat 89,36%, Riau 89,66, dan Maluku 92,43%. Kelima provinsi tersebut berada di bawah rata-rata tingkat kesempatan kerja nasional yang sebesar 92,93%. Tingkat kesempatan kerja nasional turun 1,84% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 94,77% (Rizaty, 2021). Dapat dilihat dari data tersebut bahwa peluang kerja atau kesempatan kerja di Indonesia mengalami penurunan.

BPS mencatat, jumlah iklan lowongan kerja di berbagai situsweb mengalami penurunan menjadi 3.439 iklan pada April 2020 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 11.090 iklan (Rizaty, 2021). Jumlah perusahaan yang menawarkan lowongan kerja juga turun.

BPS mencatat ada lebih dari 500 perusahaan yang menawarkan lowongan di jobs.id tiap bulannya hingga Maret 2020. Namun jumlahnya berkurang 50% menjadi 268 (April 2020) dan 207 (Mei 2020) (Thomas, 2020). Pandemi ini juga memaksa Indonesia mengalami peningkatan proporsi pengangguran usia di atas 30 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Falikul Isbah dkk (Isbah et al., 2020), menunjukkan waktu tunggu seorang freshgraduate untuk mendapatkan pekerjaan pada umumnya adalah sekitar 2 tahun. Berdasarkan penelitian tersebut, pekerjaan impian seorang freshgraduate adalah di sektor pendidikan dan pemerintahan, dengan gaji tetap, hubungan kerja tetap dan status sosial yang baik, diikuti dengan perdagangan, bisnis ritel dan teknologi komputer dan internet menempati posisi ketiga dan keempat, maka dapat dilihat bahwa perlunya perluasan lowongan pekerjaan di bidang tersebut.

Berdasarkan catatan Jobstreet, terdapat 10 sektor industri yang memiliki lowongan kerja tertinggi, diantaranya adalah sektor manajemen/konsultasi SDM, layanan kesehatan, transportasi/logistik, perdagangan umum/grosir, makanan dan minuman, komputer/teknologi informasi, produk konsumen, ritel/manufaktur/produksi, dan properti (Henry, 2021).

C. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perluasan Kerja bagi Freshgraduate di Masa Pandemi Covid-19

Salah satu cara pemerintah menjawab permasalahan pengangguran di Indonesia adalah dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (PP Perluasan Kesempatan Kerja) dan juga dengan cara mendirikan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan juga menerbitkan Rencana Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2040. Perluasan kesempatan kerja menurut PP Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau

mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dalam melakukan perluasan kesempatan kerja, pemerintah membagi ke dalam 2 aspek yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja, dan cara untuk mencapainya adalah kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan kemudahan investasi. Tugas tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. BUMN, BUMD, dan swasta dalam menerapkan perluasan kesempatan kerja tersebut harus dapat menerapkan program dan kegiatan untuk dapat menyerap tenaga kerja.

Tujuan dari perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Tugas tersebut dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan kelembagaan masyarakat. Berbeda dengan perluasan kerja ke dalam, perluasan kesempatan kerja ke luar dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan. Dalam pasal 8 UU Perluasan Kesempatan Kerja menyebutkan bahwa program kewirausahaan dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perluasan kesempatan kerja tertuang dalam Pasal 9, yaitu:

- a. permodalan;
- b. penjaminan;
- c. pendampingan;
- d. pelatihan;
- e. konsultasi;
- f. bimbingan teknis; dan/atau
- g. penyediaan data dan informasi.

Selain pemerintah pusat dan daerah, terdapat peran Menteri dalam kebijakan tersebut, yaitu untuk melakukan koordinasi. Dalam PP Perluasan Kesempatan Kerja, koordinasi tersebut berupa:

- a. memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan
- b. melakukan mediasi, motivasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja.

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 memiliki salah satu tujuan yaitu meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan. Menurut Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 ditemukan bahwa belum berfungsinya Kemnaker sebagai koordinator dan evaluator program perluasan kesempatan kerja di seluruh instansi pemerintah, daerah, dan perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Masa pandemi sekarang ini, peran pemerintah dibutuhkan lebih ekstra lagi untuk dapat mengurangi pengangguran dengan melakukan perluasan kesempatan kerja mengingat begitu besarnya dampak pandemi di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Terdapat 3 strategi pemerintah di masa pandemi ini dalam mengurangi pengangguran, yaitu (Hanifa & Fisabilillah, 2021):

1. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19, dimana dalam program ini peserta yang ada tidak hanya mendapatkan keterampilan yang mumpuni tetapi juga mendapatkan insentif setelah masa pelatihan selesai.
2. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan.
3. Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau

buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

3 strategi tersebut di implementasi pemerintah melalui beberapa program seperti di bawah ini, yaitu:

1. Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja ini mengalokasikan anggaran sekitar 20 Triliun Rupiah bagi 8,4 juta peserta, dengan penambahan anggaran sebesar Rp10 triliun bagi yang sedang mencari pekerjaan dan mengalami PHK. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan (Ginting & Herdiyana, 2020).

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Beberapa kebijakan terkait KUR yaitu (kur.ekon.go.id, 2021):

- Diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6%
- Penundaan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020-2021
- Relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan administrasi testrukturisasi KUR
- Perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR dengan besaran tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021.

Pemerintah menyiapkan berbagai jenis KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. Pada 2021 penyaluran KUR adalah KUR Super Mikro (4,71%), KUR Mikro (61,60%), KUR Kecil (33,67%), dan KUR Penempatan TKI (0,03%) (kominfo.go.id, 2021).

3. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

TKM merupakan program yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal maupun informal. Program tersebut menjadi upaya dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, juga Kementerian Tenaga Kerja mengatakn TKM merupakan solusi mengatasi pengangguran. TKM ini akan dijadikan *pilot project* oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan dan bantuan sarana usaha menjadi program dalam TKM ini melalui Program Pembentukan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP). Pada masa pandemi, TKM memprogramkan wirausaha dan padat karya. Khusus untuk mengatasi pengangguran memfokuskan pada program padat karya.



Gambar 3 TKM

Sumber: indonesiabaik.id.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan khususnya mengatasi pengangguran dengan memberikan perluasan kesempatan kerja sudah dilakukan bahkan sebelum pandemi, yaitu dengan dikeluarkan PP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan

Kesempatan Kerja. Pada masa pandemi pun pemerintah juga mengeluarkan beberapa program untuk memberikan kesempatan kerja seperti Kartu Prakerja, KUR, dan Program Tenaga Kerja Mandiri.

Dilihat dari beberapa program yang ada pemerintah lebih memfokuskan pada pengembangan karir dan pemberian bantuan untuk mengarahkan pada kegiatan usaha mandiri., namun untuk mengarahkan *freshgraduate* kepada pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang diperoleh untuk dapat masuk pada suatu perusahaan pemerintah belum optimal dalam memfokuskan kearah demikian.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasi hal sebagai berikut.

1. Menyediakan dan memperluas ruang dan akses bagi *freshgraduate* untuk dapat mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* melalui pelatihan yang terverifikasi yang telah diakui oleh perusahaan-perusahaan, serta menyediakan lowongan pekerjaan pada bidang pekerjaan yang mempunyai minat yang tinggi di kalangan *freshgraduate* melalui kerja sama dan kolaborasi dengan pihak swasta, BUMN/BUMD maupun pemerintah daerah.
2. Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja perlu mengoptimalkan Program Tenaga Kerja Mandiri dengan menambahkan fokus pada perluasan kesempatan kerja bagi *freshgraduate* di tengah pandemi, dengan memperhatikan kebutuhan, minat bakat, dan *skill* oleh *freshgraduate* dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia.
3. Memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan perusahaan seperti BUMN, BUMD, dan swasta yang merujuk pada satu data ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman, N. H., Ismail, S., Ridzuan, A. R., & Abd Samad, K. (2020). The Issue of Graduate Unemployment in Malaysia: Post Covid-19. *International Journal of Academic Research in Business and Social*

Sciences, 10(10), 834–841.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/7843>

Annazah, N. S., & Rahmatika, N. (2019). ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PENGANGGURAN DAN INFLASI: STUDI KASUS DI ASEAN 7. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(2). Diambil dari <http://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/62/36>

BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik. Diambil dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

CNN Indonesia. (2021). Angka Pengangguran Muda RI Tertinggi se-Asia Tenggara. Diambil 9 September 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210503170819-92-638002/angka-pengangguran-muda-ri-tertinggi-se-asia-tenggara>

Dits Prasanti, D. R. F. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan. Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. Bandung. Diambil dari fkip.unpas.ac.id

Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). PERAN PEMERINTAH PADA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MEMULIHKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2). Diambil dari <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/issue/view/9/final>

Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–13. Diambil dari <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/2807/1700>

Henry. (2021). Profesi yang Paling Dicari Banyak Perusahaan di Masa Pandemi. Diambil 28 Juli 2021, dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4587988/profesi-yang-paling-dicari-banyak-perusahaan-di-masa-pandemi>

- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. Diambil dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/download/8581/4408>
- Isbah, M. F., Kustiningsih, W., & Kailani, N. (2020). Kondisi dan Dinamika Transisi Fresh Graduates Perguruan Tinggi Indonesia dari Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja di Masa Pandemi. Diambil dari https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/materi/slide_webinar_14_Des.pdf
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2020). Belum Berhenti, Jumlah Pekerja Dirumahkan dan PHK Masih Bisa Nambah. Diambil 18 Juni 2020, dari <https://kadin.id/news-event/news-detail/995/belum-berhenti-jumlah-pekerja-dirumahkan-dan-phk-masih-bisa-nambah>
- Kencana, M. R. B. (2021). 91 Persen Pengangguran Belum Pernah Ikut Pelatihan Kerja Resmi. Diambil dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4649402/91-persen-pengangguran-belum-pernah-ikut-pelatihan-kerja-resmi>
- Khan, M. R. (2020). Covid- 19 ' s Impact on Fresh Graduate ' s Job Market in Bangladesh : An Observational Study. *Journal of Business and Management Studies (JBMS)*, 1(2). Diambil dari <https://al-kindipublisher.com/index.php/jbms/article/download/432/420>
- kominfo.go.id. (2021). Kartu Prakerja Upskilling SDM dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru. Diambil 8 Juli 2021, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34887/kartu-prakerja-upskilling-sdm-dan-ciptakan-lapangan-kerja-baru/0/berita>
- kur.ekon.go.id. (2021). Kebijakan KUR. Diambil dari <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>
- LPMP UNY. (2020). No TitleBAGAIMANA PELUANG KERJA DI MASA NEW NORMAL ? Diambil 11 Februari 2021, dari <http://lpmp.uny.ac.id/berita/bagaimana-peluang-kerja-di-masa-new-normal.html>
- Rahadian, A. (2019). Mengintip Potret Suram Tenaga Kerja di Indonesia. Diambil 11 Februari 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008210058-16-105438/mengintip-potret-suram-tenaga-kerja-di-indonesia>
- Ramdhani, R. N., & Kiswanto, A. (2020). Urgensi Adaptabilitas dan Resiliensi Karier pada Masa Pandemi. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 4(2), 95–106.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2), 97–112. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Rizaty, M. A. (2021). Tingkat Kesempatan Kerja DKI Jakarta Terendah Nasional. Diambil 12 Agustus 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/tingkat-kesempatan-kerja-dki-jakarta-terendah-nasional>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, V. F. (2020). Susahnya Mencari Kerja saat Pandemi COVID-19 & Pengangguran Naik. *tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/susah-mencari-kerja-saat-pandemi-covid-19-pengangguran-naik-fV55>